

**MEMPRIHATINKAN! PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TIDAK SESUAI TARGET, POSISI KAS DAERAH PEMKOT TEGAL SAAT INI
HANYA Rp25.937.004**



Sumber Gambar:

<https://radarlombok.co.id/wp-content/uploads/2022/09/Keuangan-Daerah.jpg>

Isi Berita:

PORTAL BREBES- Sungguh sangat memprihatinkan sekali, dana milik Pemkot Tegal yang saat ini tersimpan di Kas daerah jumlahnya hanya Rp 25.937.004.

Hal itu terkuak di dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tegal dengan agenda pembahasan LPP APBD 2023, Kamis kemarin.

Anggota Banggar DPRD Kota Tegal, Hj Elly Farisati kepada wartawan menyampaikan, kecilnya jumlah Kas daerah itu disebabkan oleh banyak faktor yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Ini sungguh memprihatinkan sekali, posisi kas daerah hanya 25 juta rupiah lebih sedikit. Masih besaran jumlah infaq di Masjid Agung Kota Tegal," ujar Hj Elly.

Hj Elly Farisati selanjutnya menunjukkan tulisan yang menunjukkan minimnya jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari APBD tahun 2023.

"Mau tahu kecilnya nilai SILPA tahun 2023? Nih lihat sendiri susunan dan rinciannya," kata Hj Elly sembari menunjukkan tulisan pada lembar kertas HVS.

Terlihat judul tulisan tebal berbunyi SILPA dan Defisit APBD, yang dilanjutkan dengan rincian SILPA Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 15.600.975.718,75.

Angka SILPA itu terdiri dari:

Kas Daerah Rp 25.937.004

Kas di bendahara penerimaan Rp 3.729.858.

Kas BLUD Rp 12.680.561.363,75

Kas bendahara BOS Rp 1.533.697.713

Kas di bendahara FKTP Rp 1.357.049.780.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro S.T saat dikonfirmasi perihal minimnya Kas daerah menjelaskan, bahwa minimnya Kas daerah akibat dari minimnya SILPA tahun 2023.

"Minimnya SILPA bisa diartikan bagus oleh pemerintah pusat, karena dengan begitu dianggap serapan anggaran cukup optimal. Tapi menjadi masalah bagi daerah seperti Kota Tegal yang pemasukan dari PAD nya justru jauh panggang dari api, semua PAD yang sudah terencana dengan baik, nyaris semua tidak memenuhi target," kata Kusnendro.

Kusnendro mengatakan, jujur saja di tahun 2023, hampir semua sektor pendapatan potensial tidak ada yang memenuhi target.

"Semua sektor pendapatan di tahun 2023 prosentasenya menurun drastis. Mulai dari pendapatan lelang perikanan, pendapatan pasar, retribusi parkir, pendapatan BUMD seperti Perumda Air Minum Tirta Bahari, Bank Tegal Bahari dan sektor pajak lainnya, yaitu PBB," ujarnya.

Kusnendro menambahkan, SILPA tahun anggaran 2023 merupakan salah komponen untuk pembiayaan guna menutup defisit anggaran pada penyusunan APBD 2024.

"Nah, dikarenakan realisasi SILPA 2023 lebih kecil dari nilai defisit anggaran 2024, maka pada struktur APBD 2024 dilakukan penyesuaian nilai defisit nggarannya dengan cara rasionalisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024," pungkasnya.*** (Riyanto Jayeng).

Sumber Berita:

1. <https://portalbregbes.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-1268291326/memprihatinkan-pad-tidak-sesuai-target-posisi-kas-daerah-pemkot-tegal-saat-ini-hanya-rp-25937004?page=all>, "Memprihatinkan! PAD Tidak Sesuai Target, Posisi Kas Daerah Pemkot Tegal Saat Ini Hanya Rp 25.937.004", tanggal 5 Juli 2024.
2. <https://suarabaru.id/2024/07/05/kondisi-kas-daerah-pemkot-tegal-hanya-rp-25-937-004>, "Kondisi Kas Daerah Pemkot Tegal Hanya Rp 25.937.004", tanggal 5 Juli 2024.
3. <https://www.kabarberitaku.com/2024/07/kas-pemerintah-kota-tegal-hanya-25-juta-lebih/>, "Kas Pemerintah Kota Tegal Hanya 25 Juta Lebih", tanggal 7 Juli 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05